



Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Responsif Perubahan Iklim di Kabupaten Dompu

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Dompu: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Dompu belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Dompu meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan di sekolah, perlakuan terhadap murid yang didasari stereotip gender tradisional, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta terbatasnya kesadaran dan pengetahuan mengenai isu dan dampak perubahan iklim.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Dompu untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terpercaya dan responsif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin, (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan, serta (5) memperkuat kolaborasi dan keselarasan ekosistem pendidikan.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 43,95; perempuan 44,64

Numerasi : Laki-laki 33,79; perempuan 33,81

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar 2-3 poin dari nilai rata-rata provinsi, kecuali skor literasi murid perempuan yang tercatat lima poin di bawah nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Dompu, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Dompu pada Mei 2025. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 2-4 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Banyak murid membentuk geng di sekolah, kemudian melakukan perundungan dan kekerasan terhadap murid lain. Guru pun masih memberikan hukuman verbal dan fisik pada murid. Kasus tersebut dapat berdampak pada proses belajar dan kesejahteraan murid.

Selain itu, persepsi terhadap peran dan tanggung jawab murid masih terbatas pada stereotip gender tradisional. Murid laki-laki dipandang memiliki prospek karier lebih baik dibandingkan murid perempuan, sebab akan berkontribusi besar terhadap ekonomi keluarga. Hal ini dapat membatasi capaian belajar dan aspirasi murid.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 1.344 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 11% tidak sekolah dan 89% bersekolah. Mereka belajar di sekolah yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif (32%), sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif (13%), atau sekolah luar biasa/SLB (44%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dan guru pendamping dengan kualifikasi dan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun terus berkembang di masyarakat, sehingga mereka seringkali dikucilkan.

Di sisi lain, masih banyak murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin (terutama di kawasan pesisir, sehingga mereka kekurangan gizi), murid di daerah terpencil, murid diajak orang tua ke ladang saat musim tanam dan panen (karena tidak ada yang menjaga mereka di rumah, sehingga mereka meninggalkan sekolah selama 4-6 bulan), serta murid belum bisa berbahasa Indonesia.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Dompu mencapai 108,88 dari 250. Angka tersebut lebih rendah dari indeks Nusa Tenggara Barat (115,31) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Meski begitu, menurut IRBI, kabupaten ini tetap berisiko tinggi mengalami kekeringan.

Salah satu penyebabnya, kesadaran dan pengetahuan sebagian besar masyarakat mengenai perubahan iklim masih terbatas. Perubahan iklim dianggap sebagai kejadian alami, sehingga mereka belum mengubah kebiasaan dan gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi, program mitigasi dan adaptasi pun belum berjalan optimal. Sekolah belum punya kapasitas untuk mengajarkan isu perubahan iklim pada murid serta membuat skema evakuasi di lingkungannya. Pada jangkauan lebih luas, perencanaan tata ruang belum mengantisipasi kerentanan terhadap bencana.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan anak, terlibatnya anak-anak dalam kegiatan ekonomi, dan kurangnya fasilitas pendukung bagi anak penyandang disabilitas.



Perkawinan anak

Perkawinan anak yang didorong oleh faktor ekonomi menjadi hambatan terbesar bagi anak perempuan untuk menempuh pendidikan.



Hambatan majemuk

Kombinasi antara kemiskinan, keterpencilan, migrasi, bahasa, dan gender—misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil—dapat meningkatkan risiko pengucilan dan hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan.



Perubahan iklim di daerah terpencil

Bencana akibat perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor, membuat akses jalan tertutup, sehingga anak-anak di daerah terpencil dan kawasan pesisir tidak bisa pergi ke sekolah.

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Dompu untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, dan efektif

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten. Satgas akan bekerja sama dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang telah dibentuk di setiap sekolah. Satgas dan TPPK dapat mengadvokasi program pencegahan kekerasan (pendidikan karakter dan tindakan disiplin positif), mengawasi proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, memfasilitasi layanan pendampingan yang dibutuhkan murid, serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid yang terlibat.
2. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat kapasitas dan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dengan begitu, UPTD PPA dapat memberikan bantuan hukum dan pendampingan medis bagi murid korban kekerasan secara optimal.
3. Mengintegrasikan isu kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dalam pembelajaran. Integrasi dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai secara langsung pada mata pelajaran tertentu atau lintas mata pelajaran (intrakurikuler) atau program penguatan karakter (kokurikuler atau ekstrakurikuler).



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar) secara langsung ke masyarakat, terutama bagi murid dari keluarga miskin. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.
3. Mengawasi dan memastikan pemberian bantuan tepat sasaran dan digunakan untuk pemenuhan hak pendidikan murid.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Langkah ini bertujuan memastikan kebutuhan murid penyandang disabilitas terlayani dan terpenuhi secara optimal.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard* Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan, perencanaan pendidikan, dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Mengupayakan pendanaan atau penyaluran dana bantuan kepada sekolah dan keluarga murid penyandang disabilitas, sehingga dapat saling mendukung dan memenuhi kebutuhan murid.
5. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Mengoptimalkan implementasi Surat Edaran Bupati Kabupaten Dompu Nomor 660/149/DLH/2025 tentang Gerakan Semesta Jumat Bersih. Gerakan ini bertujuan mengelola sampah sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan mengenai sekolah-sekolah yang berada di dekat sungai dan rentan banjir. Hal ini bertujuan membentuk skema evakuasi dan rencana alternatif agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
3. Mengalokasikan anggaran dana untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sekolah, seperti Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), agar dapat menjaga keamanan dan kenyamanan belajar murid.
4. Memperkuat koordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga dapat meningkatkan respons terhadap bencana dan mengurangi dampaknya.



Bappeda & Litbang: Memperkuat kolaborasi dan keselarasan ekosistem pendidikan dalam perencanaan dan penerapan kebijakan dan program pendidikan

1. Menyelaraskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan dengan kebutuhan, kebijakan, dan program pendidikan di tingkat kabupaten serta memasukkan hasilnya dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga penerapan kebijakan dan pemberian dukungan (terutama bagi murid penyandang disabilitas dan murid korban kekerasan) dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran.